



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## http://kliping.dpr.go.id

---

Judul	: Bikin Beban Negara Makin Berat : Tambah Pimpinan Dewan Tambah Juga Fasilitasnya
Tanggal	: Kamis, 22 Desember 2016
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 7

## Bikin Beban Negara Makin Berat Tambah Pimpinan Dewan Tambah Juga Fasilitasnya

Rencana penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR akan berdampak pada penambahan fasilitas yang harus disediakan negara. Alokasi anggaran juga sudah pasti akan membengkak. Sebab, negara harus menyediakan dua mobil dinas baru, dua rumah dinas baru, dua ruangan kerja baru, dan tentunya gaji dan tunjangan baru untuk dua pimpinan DPR dan MPR itu.

SAAT ini, rencana penambahan kursi pimpinan melalui revisi UU Nomor 42/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tengah dikebut Dewan. Kemarin, Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Fraksi PDIP, sebagai pengusul revisi itu telah melakukan rapat. Hasilnya, revisi itu disepakati sebagai inisiatif DPR dan akan masuk pembahasan dalam masa sidang di awal Januari 2017 nanti.

Plt Sekjen DPR Achmad Djuned mengiyakan bakal ada tambahan fasilitas yang diperlukan untuk dua pimpinan baru setelah revisi UU MD3 itu diketok nanti. Dia pun mulai siap-siap mengajukan tambahan fasilitas itu kepada pihak Sekretariat Negara (Setneg).

"Begini ada keputusan, nanti kami akan berkirim surat ke Sekretariat Negara. Lalu, juga penambahan staf khusus bagi pimpinan, ajukan kami minta ke Kapolri," kata Djuned.

Mengenai tunjangan, Djuned menyatakan sudah pasti akan ada tambahan. "Tunjangan pimpinan ada. Yang berkaitan dengan hak-hak keuangan sesuai dengan pimpinan lainnya," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga menge-

mukakan hal ini. Menurutnya, dengan adanya penambahan pimpinan, akan terjadi penyesuaian anggaran. Sebab, para pimpinan baru di DPR dan MPR itu harus diberi fasilitas yang sama dengan para pimpinan yang ada selama ini.

"Ya tentulah diperhitungkan. Kalau misalnya itu (penambahan pimpinan) terjadi, tentu harus menyesuaikan. Nanti kita lihatlah anggarannya," ucap pentolan Gerindra ini.

PKS, yang awal-awalnya kritis terhadap penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR ini, mulai melunak. PKS bahkan mengaku tidak masalah dengan penambahan fasilitas untuk para pimpinan baru nanti. Padahal, sebelumnya PKS begitu keras menentang revisi itu.

Anggota Fraksi PKS Soemandjaja menyatakan, penambahan fasilitas baru nanti diperlukan untuk menunjang kinerja pimpinan DPR dan MPR baru. "Kalau dibandingkan dengan kebutuhan, penambahan sejumlah fasilitas itu tidak masalah," ucapnya.

Dia pun ikut meyakinkan publik bahwa beban negara untuk penambahan fasilitas baru itu tidak terlalu besar. "Beban

keuangan itu takkan begitu besar seperti mengangkat anggota yang baru," tandasnya.

### Empat Butir Revisi MD3

Dalam rapat Baleg dengan Fraksi PDIP kemarin, disepakati empat butir perubahan. Empat butir itu adalah penambahan kursi pimpinan MPR, penambahan kursi pimpinan DPR, penambahan kursi pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dan penguatannya Baleg dalam mengusulkan RUU.

"Apakah hasil perhamonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang perubahan kedua UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dapat disetujui?" tanya Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas di ruang rapat Baleg, kemarin. "Setuju..." jawab para anggota Baleg yang hadir.

Selanjutnya, hasil rapat ini akan dibawa ke pimpinan DPR. Setelahnya, akan dibacakan dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Pembahasan bersama pemerintah baru akan dilakukan setelah rapat paripurna.

Politisi Gerindra ini yakin, pembahasan akan berlangsung cepat karena pasal yang dibahas tidak banyak. "Kami harap setelah masa sidang mendatang dibuka, dapat segera disetujui jadi inisiatif DPR. Mekanisme meski hanya revisi terbatas namun harus ikuti mekanisme pembuatan UU," tutur Supratman. ■ QAR/ONI